

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PALU SELATAN

St. Aisyah Maulidyah Riskayanti

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

The aim of this research was to know the implementation of society security and safety aid policy in palu selatan sub-district. This was a qualitative research. The informant of this research were village chief, babinsa, polmas, the member of bankamdes, and the community. These informants were determined by using purposive sampling technique. Data collection method covered observation, interview, and documentation, while data analysis technique consisted of data reduction, data display, and conclusion. The theory used was taken from Edward III dealing with communication, resources, disposition, and bureaucracy structure. Generally, the result of the research showed that the policy of society security and safety aid in palu selatan sub-district, particularly in tavanjuka, nunu, palupi, and pengawu had been implemented well. However, the communication done was not good yet, because from the four places of this research field, one place only, palupi, did it well. Moreover, the resources had a good ability in implementing the policy because it did the policy based on the rule stated. The disposition of the policy, particularly for tavanjuka, nunu, palupi and pengawu accepted the policy well, due to the purpose of this policy was to give the security and safety for environment. Besides, the conductors of the policy also emphasized the community needs in conducting the policy; whereas, the bureaucracy structure in this policy was implemented according to the rule or the orientation related to bankamdes. Therefore, administration of the policy was suitable with the expectation, or it was based on the rules to be obeyed.

Keywords: *implementation, policy, security, and safety aid*

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah senantiasa memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan dan potensi serta keanekaragaman daerah. Tatanan normative tujuan pemberian otonomi kepada daerah (kota dan kabupaten) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kata kuncinya adalah untuk memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional. Semua ini akan dapat diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya serta tindakan nyata pelaksanaan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dari kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan, maka kabupaten kota dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan keanekaragaman yang terdapat pada masing-masing daerah. Kota Palu sejak menjadi daerah

otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 sekaligus menjadi ibukota provinsi Sulawesi Tengah, dengan memiliki luas wilayah $\pm 395,06 \text{ km}^2$ yang terdiri dari 4 kecamatan yaitu:

- 1) Kecamatan Palu Utara terdiri dari 10 Kelurahan,
- 2) Kecamatan Palu Selatan terdiri dari 12 Kelurahan,
- 3) Kecamatan Palu Timur terdiri dari 8 Kelurahan, dan
- 4) Kecamatan Palu Barat terdiri dari 15 Kelurahan.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk pada suatu wilayah maka akan berbanding lurus terhadap masalah yang ditimbulkannya di antaranya:

- 1) Permasalahan Lalulintas. Tidak bisa dipungkiri bahwa bertambahnya jumlah penduduk di Kota Palu akan diiringi pula

dengan bertambahnya volume kendaraan yang mengakibatkan kepadatan lalu lintas, sehingga tidak jarang terjadi kemacetan di ruas-ruas jalan tertentu. Selain peningkatan volume kendaraan, pedagang-pedagan kaki lima yang menjajakan jualannya di trotoar juga ikut menyumbang terhadap kemacetan arus lalu lintas.

- 2) Sering terjadi pertikaian baik yang melibatkan kelompok-kelompok pemuda dari kelurahan yang sama, sampai pada tingkat antar kelurahan di kota palu yang melibatkan hampir seluruh anggota masyarakat dari kedua kelurahan yang bertikai sehingga mengganggu stabilitas keamanan kota.

Untuk mengantisipasi masalah ketertiban dan keamanan dalam lingkungan Kota Palu, oleh Pemerintah Kota Palu bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, telah melahirkan satu kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Instruksi Walikota Palu Nomor: 01 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Program Teknis Forum Bantuan Keamanan Desa/Kelurahan se-Kota Palu tertanggal 8 September 2011.

Bila semua permasalahan sosial tersebut tidak ditangani secara serius dan secara berpola, maka akan menjadi bermacam bentuk “Gangguan Keamanan dan Ketertiban” yang tentunya mengganggu jalannya pembangunan

di daerah. Forum Bankamdes dalam pola operasionalnya memiliki 3 fungsi, yaitu:

- 1). Fungsi Preemptif
- 2). Fungsi Preventif
- 3). Fungsi Refresif

Berdasarkan fenomena di lapangan, maka calon peneliti tertarik untuk mengambil judul rencana penelitian “Implementasi Kebijakan Bantuan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Palu Selatan”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti mengajukan permasalahan penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan bantuan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Palu Selatan?

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan bantuan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Palu Selatan.

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian tentang Implementasi kebijakan telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa temuan tentang Implementasi Kebijakan dari beberapa nara sumber, atau rujukan tambahan, antara lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama dan tahun pembuatan tesis	Judul Tesis	Persamaan	Perbedaan
1. Ahmadi (2004)	Implementasi Kebijakan Kemitraan Pemerintah Kota dan Swasta Dalam Pembangunan Peremajaan Pasar Sukaramai Pekanbaru	Fokus penelitian menggambarkan tentang kemitraan antara pemerintah kota dan swasta, sedangkan rencana penelitian calon peneliti kemitraan antara pemerintah kota, lembaga uang ada di kelurahan dalam hal ini BANKAMDES dan masyarakat.	fokus penelitian menggambarkan tentang pembangunan peremajaan pasar Sukaramai Pekanbaru, sedangkan rencana penelitian calon peneliti adalah mengenai masalah keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di Kecamatan Palu Selatan.
2. Richard Sumolang (2006)	Implementasi Kebijakan Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam meningkatkan Kualitas Layanan di Kota Palu	Fokus penelitian menggambarkan tentang layanan dalam bidang perizinan yang ada di kota palu, sedangkan rencana penelitian calon peneliti tentang layanan dalam bidang keamanan dan ketertiban.	Fokus penelitian menggambarkan tentang kualitas layanan yang ada di Kantor Perizinan Terpadu di Kota Palu sedangkan rencana penelitian calon peneliti tentang kebijakan BANKAMDES di Kecamatan Palu Selatan.

Implementasi Kebijakan

Studi implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2007: 145) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh ber-

bagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksud untuk membuat program berjalan.

Kebijakan

Kebijakan adalah kompas atau pedoman untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Kebijakan sebagai sebuah pedoman terdiri atas dua nilai luhur, yaitu kebijakan harus cerdas, yang secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu cara yang mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan masalahnya sehingga sebuah kebijakan harus disusun setelah meneliti data dan menyusunnya dengan cara-cara ilmiah, dan kebijakan haruslah bijaksana

Untuk memahami kebijakan publik banyak para ahli yang memberikan pengertian kebijakan tersebut, antara lain Dye (1978: 3) "*Is whatever governments choose to do or not to do*". Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya

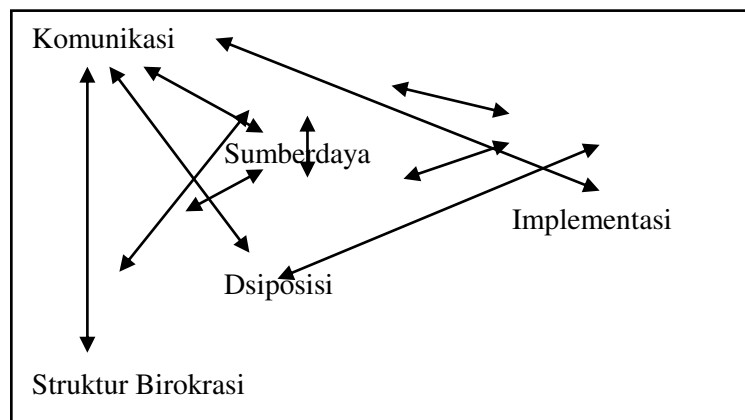
(obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Pengertian kebijakan publik menurut pendapat Santoso (1988: 5) adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit pemerintah. Berdasarkan beberapa pendapat mengenai rumusan arti kebijakan, pada intinya setiap rumusan mengandung beberapa unsur, yaitu: (1) adanya serangkaian tindakan, (2) dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, (3) adanya pemecahan masalah, dan (4) adanya tujuan tertentu.

Dengan memadukan ke empat unsur tersebut diatas maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang berisi keputusan-keputusan yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu.

Model Implementasi Kebijakan

Dalam pandangan Edward III dalam Nugroho, (2008: 447), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Ke empat variabel tersebut dapat saling berhubungan satu sama lain seperti yang terlihat di bawah ini:



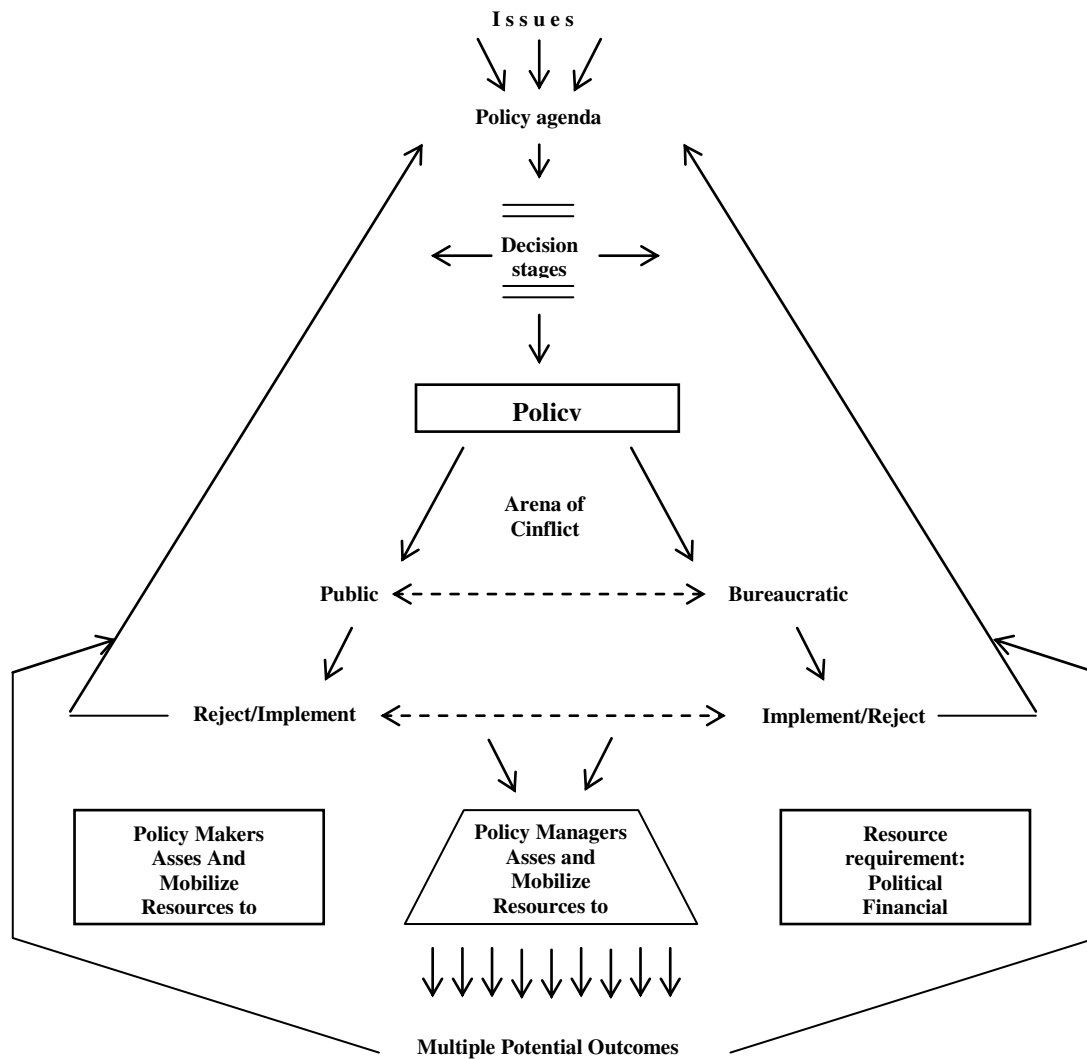
Sumber: Edwards III, 1980: 148 (dalam Subarsono, 2009:

Gambar 2.2

Faktor Penentu Implementasi menurut Edward III

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Selanjutnya keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Nugroho, (2008: 445) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*).



sumber: Grindle, Merilee S, 1980: 11 dalam Nugroho (2008:445)

Gambar 2.3

Implementasi sebagai Proses Politik dan Administrasi

Dari kedua model implementasi yang diuraikan di atas maka dalam penelitian ini teori yang akan digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah teori implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh George C. Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Teori Sistem

Sebuah definisi tentang sistem yang paling sederhana menurut Von Bertalanffy

dalam Nisjar dan Winardi (1997: 15) adalah: *"....a complex of interacting elements"*. Penamaan teori sistem umum diperuntukkan untuk studi, dimana teori-teori dan model-model dikembangkan, dan yang dapat diterapkan terhadap dua bidang ilmu atau lebih, maupun bagi teori-teori interdisipliner yang tidak dihalangi oleh objek pengenal tradisional, maksudnya dari objek pengenal yang melingkupi. Teori sistem umum dipandang secara formal, bukanlah sebuah teori melainkan sebuah nama kumpulan, dimana didalamnya memang tercakup sejumlah teori-teori formal.

Penertiban

Dalam menyusun dan mengelola organisasi berorientasi pada tertib administrasi baik itu organisasi yang besar maupun organisasi kecil, perlu memperhatikan asas-asasnya. Asas-asas dimaksud adalah:

- 1) Pembinaan kesatuan arah (*unity of direction*) artinya tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara jelas dalam proses pelaksanaan pencapaiannya memerlukan kesatuan gerak, langkah, jiwa dan arah;
- 2) Perumusan tujuan organisasi secara jelas. Artinya organisasi merupakan alat (*organu*: latin). Disusun untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan itu harus jelas sehingga harus dirumuskan secara tertulis agar dapat menjadi pedoman dalam menetapkan langkah-langkah kebijakan. Maknanya adanya pola kerja dengan baik dan menumbuhkan semangat atau jiwa pengabdian;
- 3) Pembinaan kesatuan perintah (*unity of command*). Artinya dalam suatu kegiatan kerja sama seperti organisasi terdapat orang yang memberi perintah kerja dan orang atau orang-orang yang menerima atau melaksanakan perintah tersebut. Makna setiap pegawai harus mengetahui dan siapa ia boleh menerima perintah dan kepada siapa dia harus memberi pertanggungjawaban pekerjaannya;
- 4) Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Artinya pemberian wewenang kepada seseorang secara otomatis meminta pertanggungjawaban orang yang menerimanya sebagai realisasi dan pelaksanaan wewenang yang diterimanya itu. Luas tanggung jawab yang wajib diberikan oleh seseorang pejabat adalah seimbang dengan besar wewenang yang diterimanya;
- 5) Pembagian tugas (*disfribution of work*). Artinya berbagai jenis pekerjaan harus dibagi-bagikan kepada orang yang tergabung dalam organisasi. Dalam pembagian atau penyerahan pekerjaan itu perlu memperhatikan kemampuan atau keahlian seorang pegawai;

- 6) Pengelompokan fungsi. Artinya Dalam suatu organisasi yang besar seperti Dinas (SKPD) jenis dan jumlah pekerjaannya makin banyak. Untuk memudalikan pengaturan dan pengawasan atau pengendaliannya, sehingga dapat berjalan dengan tertib dan lancar maka pekerjaan itu perlu dikelompok-kelompokan menjadi beberapa kelompok kerja tertentu;
- 7) Rentangan control (*span of control*). Artinya jumlah maksimum bawahan langsung yang dapat dikontrol dengan baik oleh seorang pimpinan.

Dengan ketujuh item asas-asas penyusunan dan pengelolaan organisasi ini, maka akan diperoleh suatu tertib administrasi yang baik, sebagaimana yang tertera dalam tata kerja dan struktur organisasi. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik dinas, badan, kantor adalah suatu organisasi pemerintah daerah yang menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan yaitu bagaimana aparatur pemerintah Kota Palu

Alur Pemikiran

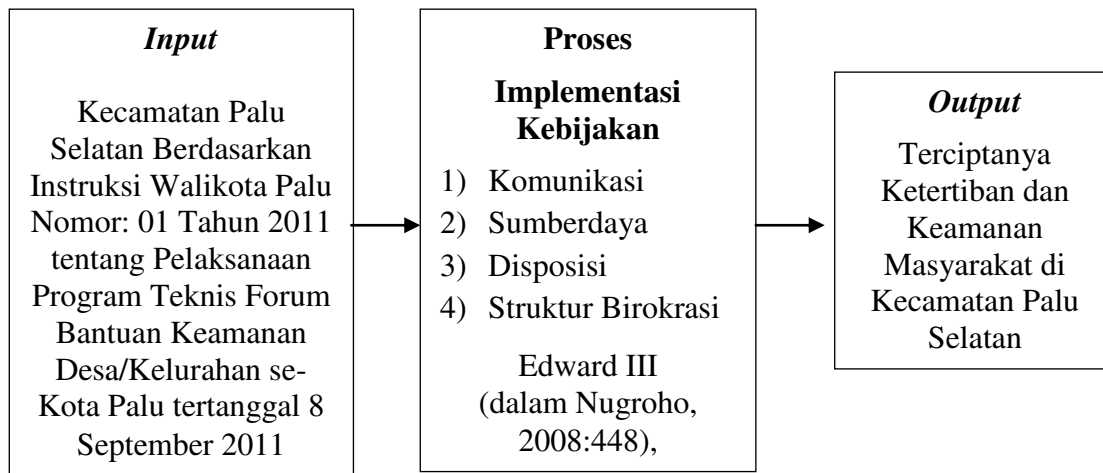
Kerangka pemikiran adalah menjelaskan tentang masalah yang akan diteliti, melalui akta dan teori. Implementasi kebijakan menurut George C, Edward III dalam Nugroho, (2008: 447), menyebutkan 4 aspek yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi.

Keempat aspek di atas dalam model yang dibangun Edward III keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran/kebijakan semua saling bersinergi dalam mencapai tujuan dalam satu aspek akan sangat mempengaruhi aspek lain.

Berdasarkan rumusan masalah dan dikuatkan dengan beberapa teori yang dijadikan patokan dalam melahirkan aspek-aspek

implementasi kebijakan, maka dapat dilihat alur pemikiran di bawah ini.



Gambar 2.4
Alur Pemikiran

METODE

Jenis dan Tipe penelitian

Hakekat dari suatu penelitian adalah suatu kegiatan yang mempunyai tujuan menemukan sesuatu atau memecahkan sesuatu dan mendapatkan jawaban terhadap suatu masalah. Untuk itu dalam proses tersebut, memerlukan suatu perumusan terhadap permasalahan yang akan diteliti kemudian menentukan metode yang tepat untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan tersebut sehingga lebih memudahkan dan mengarah pada sasaran dan tujuan penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian ini berusaha untuk memperoleh pandangan baru tentang suatu gejala atau untuk mendapat gambaran ciri-ciri individu atau kelompok.

Kirk dan Miller dalam Moleong, (2005) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya maupun dalam peristilahannya. Makna yang terkandung dalam

pendekatan kualitatif ini ditunjukkan melalui implementasi di lapangan dengan melakukan pengamatan terhadap suatu gejala, baik pengamatan langsung melalui informasi maupun dengan mempelajari data-data untuk dapat menjawab pertanyaan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan maksud hasil penelitian akan memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang akan diteliti.

Dalam penelitian deskriptif ini, berusaha menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan proses-proses pelaksanaan kebijakan BANKAMDES dalam ketertiban di Kelurahan Pengawu; serta faktor-faktor yang menghambat dalam kegiatan kebijakan BANKAMDES tersebut.

Merujuk pada teori yang disampaikan diatas, maka penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif sangat sesuai untuk memahami dan menggambarkan fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat. Peneliti berkeyakinan bahwa dengan penelitian kualitatif akan diperoleh informasi yang selanjutnya dengan informasi tersebut peneliti bisa membuat interpretasi dan analisis untuk mendeskripsikan kebijakan

BANKAMDES dalam ketertiban di Kecamatan Palu Selatan.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan Waktu

Dalam menentukan lokasi penelitian keterbatasan geografis dan praktis, seperti waktu, biaya, tenaga perlu dijadikan. Lokasi yang diambil adalah Kecamatan Palu Selatan dengan studi kasus di 4 (empat) kelurahan yakni Tatura Selatan, Tavanjuka, Palupi dan Pengawu,

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan mulai bulan Juni sampai dengan Juli Tahun 2012, namun tergantung situasi dan kondisi di lapangan serta tergantung keaktifan dan intensitas peneliti dalam pengumpulan dan pengolahan serta analisa data.

Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat, aparat dan stakeholder di Kecamatan Palu Selatan khususnya di 4 (empat) kelurahan yakni Tatura Selatan, Tavanjuka, Palupi dan Pengawu. Penentuan informan penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2011: 216) *purposive sampling*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Artinya peneliti dengan sengaja memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

- 1) Camat Palu Selatan
- 2) Lurah
- 3) Tokoh Masyarakat
- 4) Babinsa
- 5) Polmas (Polisi Masyarakat)
- 6) Anggota forum BANKAMDES

Definisi Konsep

Adapun teori pada penelitian ini yaitu implementasi kebijakan. Implementasi Kebijakan yang dimaksud adalah suatu tindakan dalam pelaksanaan suatu keputusan atau undang-undang yang ditetapkan oleh pengambil untuk dilaksanakan dalam rangka menyele-

saikan masalah publik yang dalam hal ini adalah masalah implementasi kebijakan bantuan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Palu Selatan Khususnya di Kelurahan Pengawu, Tatura Selatan, Tavanjuka dan Palupi. Adapun aspek-aspek dalam melihat hal tersebut yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data primer
2. Data sekunder.

Teknik Pengambilan dan Pengumpulan Data

Dalam rencana penelitian ini, peneliti mengambil dan mengumpulkan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi atau pengamatan
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Instrumen Penelitian

Menurut Anderson dan Meyer dalam Sugiyono (1998: 157) penelitian kualitatif sering juga dapat dipertukarkan dengan penelitian naturalistik (*naturalistic inquiry*). Selanjutnya Lincoln dan Guba dalam Sugiyono (1998: 160) mengemukakan bahwa dalam pendekatan naturalistik peneliti seyogianya memanfaatkan dirinya sebagai instrumen sebagai pengganti lebih memadai bagi pendekatan lebih objektif, karena instrumen non manusia sulit digunakan secara luwes untuk menangkap berbagai realitas dan interaksi yang akan dimasuki dan makna dibalik realitas dan interaksi tersebut, dan meskipun semua instrumen mengandung nilai dan berinteraksi dengan nilai lokal, hanya manusialah yang berada pada posisi untuk mengidentifikasi dan mempertimbangkan penyimpangan yang muncul. Pandangan tersebut menekan-

kan bahwa instrumen terpenting dalam penelitian naturalistik adalah manusia karena manusia dianggap luwes dalam melihat realitas yang terjadi.

Teknik Analisis Data

Menurut Nasution (1996: 142) analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif, dari lapangan tertentu yang bersifat khusus untuk ditarik suatu proposisi atau teori yang dapat digeneralisasikan secara luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Gambaran Tentang Forum BANKAMDES

Forum Bankamdes disemua desa/kelurahan sudah punya struktur pemerintahan masing-masing dan juga sudah punya Struktur Lembaga Tradisional yaitu lembaga adat sehingga struktur lembaga yang sudah ada ini kita sinergikan dengan melibatkan anggota forum dari para perwakilan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa/Kelurahan tersebut. Jadi anggota forum antara lain para ketua RW, Tokoh Adat, Lintas Agama, Masyarakat, Pemuda, Wanita dan seterusnya yang ada di Desa/Kelurahan tersebut.

Kepengurusannya silahkan ditentukan dari anggota Forum tersebut. Forum inilah yang diharapkan dibentuk di setiap desa/Kelurahan oleh pak Lurah atau Kepala Desa bersama Babinkamtibmas Polri. Babinkamtibmas sekaligus sebagai Pembina forum tersebut, sehingga setiap kebijakan strategis di Desa/Kelurahan yang diambil oleh lurah atau kepala Desa untuk membangun Desa/Kelurahan mendapat dukungan dari forum yang notabene sebagai representasi dukungan masyarakat, termasuk dalam menangani permasalahan sosial yang ada di Desa/Kelurahan.

Peran Forum BANKAMDES

- 1) Berpatner dengan Kepala desa dan Lurah mendatakan dan mengidentifikasi potensi desa/kelurahan yang dapat tergarap.
- 2) Membuat kesepakatan dan komitmen seluruh warga dalam untuk turut serta mendukung pembangunan daerah.
 - 1) Menciptakan keamanan desa/kelurahan Menciptakan penghijauan di desa/kelurahan (*green*)
- 3) Bidang kebersihan (*clean*)
- 4) Menyepakati sanksi/denda yang di berikan kepada warga sebagai akibat konsensus dan komitmen atas kesepakatan.
- 5) Melaksanakan analisa dan evaluasi secara rutin terhadap kesepakatan yang di buat.

Peran BANKAMDES

- 1) Preemtif
- 2) Preventif
- 3) Represif

Pembahasan

Implementasi Kebijakan Bantuan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Palu Selatan

Pelaksanaan kebijakan Bantuan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam penelitian ini dilihat dari empat aspek implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III yang meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Berdasarkan hasil-hasil wawancara yang tidak semuanya dicantumkan dikarenakan adanya kesamaan jawaban pada beberapa informan maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan bantuan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Palu Selatan dalam hal mengkomunikasikan kebijakan yang jelas dan sesuai tujuan adalah belum menunjukkan hasil yang baik karena dari empat kelurahan yang dijadikan lokasi penelitian ini, hanya satu kelurahan yang melakukan atau mengkomunikasikan kebijakan dengan baik yaitu Kelurahan Palupi.

Sumberdaya

Berdasarkan hasil-hasil wawancara yang tidak semuanya dicantumkan dikarena-

kan adanya kesamaan jawaban pada beberapa informan maka dapat disimpulkan bahwa Sumberdaya yang dimiliki dimasing-masing kelurahan yang ada diwilayah Kecamatan Palu Selatan sudah cukup baik. Kebijakan bantuan keamanan dan ketertiban masyarakat ini memiliki maksud yang baik jadi di dalam pelaksanaannya memerlukan sumberdaya yang memadai yang dapat mengkomunikasikan kebijakan dengan baik sehingga mendapat respon positif dari masyarakat dimana kebijakan ini dijalankan yang pada akhirnya menciptakan ketentraman.

Disposisi

Berdasarkan hasil-hasil wawancara yang tidak semuanya dicantumkan dikarenakan adanya kesamaan jawaban pada beberapa informan maka dapat disimpulkan mengenai sikap pelaksana menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan bantuan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Palu Selatan khususnya di Kelurahan Tavanjuka, Tatura Selatan, Palupi, dan Kelurahan Pengawu menerima kebijakan tersebut dengan baik, hal ini dilakukan karena tujuannya untuk memberikan keamanan dan ketenteraman lingkungan, selain itu hasil di atas menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan juga mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan kebijakan ini karena untuk keberhasilan kebijakan ini maka dukungan pelaksana dan masyarakat sangat penting.

Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil-hasil wawancara yang tidak semuanya dicantumkan dikarenakan adanya kesamaan jawaban pada beberapa informan maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan bantuan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan sesuai aturan atau pedoman mengenai Bankamdes hanya saja belum sepenuhnya dijalankan dengan baik dikarenakan masyarakat di beberapa Kelurahan masih lebih mendengar apa yang dikatakan oleh Dewan adat dibandingkan oleh petugas BANKAMDES, dan juga dikarenakan faktor komunikasi yang masih

kurang dilakukan oleh petugas BANKAMDES.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan bantuan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Palu Selatan khususnya di Kelurahan Tavanjuka, Tatura Selatan, Palupi, dan Kelurahan Pengawu secara umum sudah diimplementasikan dengan belum cukup baik, hal ini dikarenakan dari 4 (empat) variabel yang dikemukakan Edward III tidak semua dapat berjalan dengan baik

Komunikasi yang dilakukan belum baik karena dari empat kelurahan yang dijadikan lokasi penelitian ini, hanya satu kelurahan yang melakukan atau mengkomunikasikan kebijakan dengan baik yaitu Kelurahan Palupi. Kemudian sumberdaya memiliki kemampuan yang baik dalam mengimplementasikan kebijakan karena di dalam menjalankan kebijakan pelaksana melakukannya sesuai dengan tujuan dikeluarkannya kebijakan ini yaitu untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Disposisi dalam kebijakan bantuan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Palu Selatan khususnya di Kelurahan Tavanjuka, Tatura Selatan, Palupi, dan Kelurahan Pengawu menerima kebijakan tersebut dengan baik. Sedangkan struktur birokrasi dalam kebijakan ini diimplementasikan sesuai aturan atau pedoman mengenai Bankamdes, hanya saja masih belum sepenuhnya dijalankan dengan baik dikarenakan masyarakat di beberapa Kelurahan masih lebih mendengar apa yang dikatakan oleh Dewan adat dibandingkan oleh petugas BANKAMDES.

DAFTAR RUJUKAN

Dye, Thomas R. 1978. *Understanding Publik Policy, Englewood Cliffs*. New Jersey: Prentice-Hall.

- Moloeng, Lexy J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Tarsito. Bandung
- Nugroho D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Koputmdo Kelompok Gramedia
- Santoso. 1998. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
- Sugiyono. 1998. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Winardi dan Nisjar. 1997. *Teori Sistem dan Pendekatan Sistem dalam Bidang Manajemen*. Bandung: Mandar Maju
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Instruksi Walikota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pedoman teknis Forum BANKAMDES/Kelurahan se Kota Palu
- Ahmadi. 2004. *Implementasi Kebijakan Kemitraan Pemerintah Kota dan Swasta Dalam Pembangunan Perumahan Pasar Sukaramai Pekanbaru*.
- Richard Sumolang. 2006. *Implementasi Kebijakan Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam meningkatkan Kualitas Layanan di Kota Palu*. Tesis. Palu: Program Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Tadulako.